

## PERAN BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT DALAM PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH DI Podosugih, Kota Pekalongan

Indah Dwi Lestari<sup>1</sup> dan Ir. Agung Sugiri MPST<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro

<sup>2</sup>Dosen Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro

Email: indahdeel.1234@gmail.com

**Abstrak:** Permasalahan kemiskinan dan lingkungan permukiman kumuh di kota menyangkut banyak aspek yang mengikutinya. Konsep yang sesuai untuk mengatasi masalah seperti di atas yaitu menggunakan kosep pemberdayaan masyarakat misalnya dengan dibentuk Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Kegagalan program pemerintah yang ada saat ini sering disebabkan tidak diberdayakannya masyarakat dalam pelaksanaan program. Pelibatan masyarakat dari perencanaan sampai pembangunan mampu menumbuhkan rasa memiliki terhadap lingkungan. Namun, kajian mengenai peran lembaga lokal yang bersifat swadaya seperti BKM masih jarang dilakukan. Penelitian yang ada cenderung melihat dari segi pemerintahnya.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan penting, yaitu “**apa peran kelompok BKM Kelurahan Podosugih dalam kaitannya dengan penanganan masalah permukiman kumuh Kota Pekalongan?**” Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yaitu dengan menentukan fokus penelitian/proposisi penelitian kemudian menyusun perangkat penelitian berupa form wawancara kepada narasumber. Penelitian ini menghasilkan suatu pemahaman yang baik terhadap peran BKM dalam menangani masalah slum dan rekomendasi bagi peningkatan kinerja serta inspirasi bagi daerah lain untuk kesuksesan dalam penanganan masalah yang sama.

Di antara temuan penting mengenai peran kelompok BKM dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Podosugih adalah dalam mendorong perubahan sikap dari masyarakat yang menjadi peduli terhadap lingkungan. Kepedulian tumbuh karena ada pelibatan masyarakat dari penyusunan program hingga pelaksanaan sehingga mereka merasa memiliki dan wajib memelihara hasil pembangunan untuk generasi yang akan. Temuan lain dari penelitian yaitu, untuk mengatasi masalah lingkungan permukiman kumuh yang ada, BKM tidak melakukan peningkatan kemampuan dalam bidang teknis pengelolaan lingkungan seperti pembuatan peta atau pelatihan software lainnya, melainkan pelatihan peningkatan ekonomi dan kohesi sosial masyarakat. Keberhasilan kinerja BKM ini hendaknya menjadi contoh yang dapat ditiru oleh daerah lain.

Namun, suatu pembangunan yang melibatkan masyarakat dapat dikatakan berhasil sepenuhnya jika ada keberlanjutan finansial dari masyarakat sendiri tanpa bantuan pemerintah. Indikasi menunjukkan bahwa prospek keberlanjutan finansial dalam perbaikan kumuh di Podosugih masih belum baik. Karenanya, aspek keberlanjutan finansial merupakan salah satu rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut.

**Kata Kunci:** Peranserta Masyarakat; Pengentasan Kemiskinan; Perbaikan Kumuh; Kota Pekalongan; Kelurahan Podosugih; Badan Keswadayaan Masyarakat

## THE ROLE SELF-SUPPORTING COMMUNITY GROUP TO SLUM UP-GRADING IN Podosugih, PEKALONGAN CITY

**Abstract:** Problems of poverty and slums in cities involve many aspects. Among the recent concepts appropriate to solve the problems is people empowerment as applied in the self-supporting community groups (Badan Keswadayaan Masyarakat/BKM). Inappropriate performances in slum upgradings are often caused by not empowering the society in the efforts. Community involvement in every stage, from planning to construction, is capable to generate a sense of belongings. However, studies on the role of local community groups that are self-supporting in nature are still hard to find in Indonesia despite the significance of the lessons learned from best practices.

This research is aimed at answering an important question, “**what role has been contributed by the community self-supporting group (BKM) of Podosugih in the successful slum upgrading of Pekalongan City?**” This study has applied a qualitative approach, in which a set of propositions has been formulated and confirmed to the field through in-depth interviews to the key persons. This research has resulted in good understanding on the role of BKM in a successful slum upgrading, based on the lessons of which inspirations to improve the performance of slum upgradings in other urban areas are recommended.

Among the important findings of the research is the BKM’s encouragement in the behavioural change of the community towards caring for the environment. Awareness to the settlement environment has grown because of the community involvement in the slum upgrading, from the formulation to implementation stages. This has increased their ownership feelings and, as a consequence, improved their willingness to make efforts in maintaining the results of the program for the next generation. Another important finding is that to solve the problems of slum, BKM has not trained people to increase their technical capability in environmental management like making maps and using related application softwares. Instead, BKM has trained the community to increase the economic opportunities and to improve the social cohesion; the kinds of training that have been proven very useful. This is somewhat different to what has been set in the proposition, although certainly not in the negative sense. Finally, Podosugih BKM’s successful contribution could be emulated by BKMs in other regions.

However, any slum upgrading involving the local communities can be said as fully successful if financial sustainability that is not mainly based on the government’s expenditure can be ensured. The research has indicated that the prospect for financial sustainability in Podosugih is not good. Studies on the aspects of financial sustainability in slum upgrading are therefore recommended for further research.

**Keywords:** community participation; community self-supporting group; Poverty alleviation; Slum upgrading; Pekalongan City; Podosugih Village

### PENDAHULUAN

#### Latar Belakang

Masalah permukiman kumuh terasa sekali di kota-kota besar di Indonesia, misalnya Kota Bandung dan Kota Semarang. Masalah permukiman kumuh di Kota Bandung sebetulnya sudah terjadi sejak tahun 1970-an. Pemerintah Kota Bandung telah melakukan berbagai langkah terhadap permukiman kumuh, antara lain Program Perbaikan Kampung (KIP) pada tahun 1978, pemugaran dan rehabilitasi rumah serta rumah susun. Berdasarkan data dari Bappeda Kota Bandung dari 139 Kelurahan yang ada di Kota Bandung terdapat 122 kelurahan yang termasuk kumuh, itu berarti hanya 17 kelurahan saja yang dikategorikan sebagai kelurahan tidak kumuh. Sedangkan hasil dari

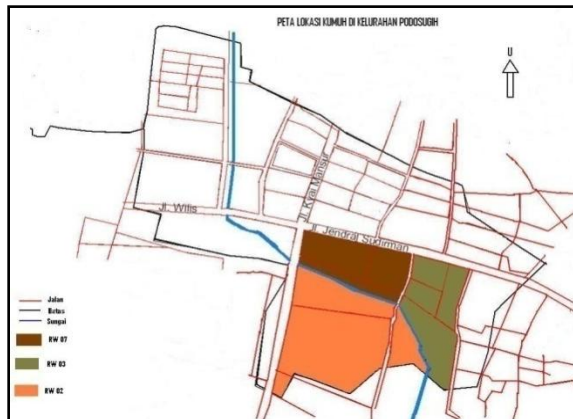
penelitian di Kota Semarang, jumlah kawasan permukiman kumuh (*slum area*) terdapat di 9 Kecamatan yang totalnya berjumlah 42 titik lokasi kawasan permukiman kumuh (*slum area*). Selama kurun waktu 43 tahun (1963-2006) terjadi penambahan 21 titik lokasi kawasan permukiman kumuh (*slum area*). Dengan demikian rata-rata tiap tahunnya di Kota Semarang selalu tumbuh dan berkembang 1 kawasan permukiman kumuh (*slum area*) baru. Didalam mengatasi permasalahan permukiman kumuh (*slum area*) di wilayah Kota Semarang, pihak Dinas Tata Kota dan Permukiman (DTKP) Kota Semarang melakukan peremajaan kawasan kumuh (*slum area*) melalui pembangunan skala besar dan pembangunan rumah susun (rusun). Begitu juga yang terjadi di Kota Pekalongan,

sebelumnya dikenal sebagai salah satu kantong kemiskinan di Tanah Air. Hal ini dapat dilihat dari jumlah penduduk Kota Pekalongan 267.574 jiwa yang tersebar di 4 kecamatan, sedangkan jumlah rumah tangga 65.956 dan jumlah rumah tangga miskin 31.461 atau 47,7% dari jumlah Rumah Tangga se-Kota Pekalongan (sumber: Pekalongan dalam angka 2005). Menanggapi masalah kemiskinan di Kota Pekalongan, P2KP Kota Pekalongan berusaha mensinergiskan peran antara pemerintah dan masyarakat sebagai objek maupun subjek dalam pembangunan. Upaya tersebut dengan membentuk sebuah lembaga dalam masyarakat yaitu Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). BKM merupakan lembaga perwakilan dari masyarakat dalam mengatasi permasalahan di lingkungan. Kriteria BKM sebagai organisasi masyarakat, yang bertumpu pada kepentingan masyarakat miskin, maka: 1) lembaga yang prakarsa pembentukan maupun pengelolaannya ditentukan oleh masyarakat sendiri, 2) kekuatan bersumber dari masyarakat sendiri, 3) berkedudukan sebagai lembaga kepemimpinan kolektif dan sebagai perwakilan masyarakat pada tingkat lokal dalam program penanggulangan kemiskinan. BKM ini diharapkan wadah perjuangan kaum miskin menyuarkan aspirasi dan kebutuhan mereka. Program yang dilakukan BKM ini menggunakan sistem pemberdayaan masyarakat.

Tiap BKM bersama masyarakat telah menyusun Perencanaan Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan. BKM ini bekerja atas fasilitasi pemerintah dan kerjasama dengan masyarakat. BKM ini kemudian bekerjasama dengan berbagai instansi pemerintah dan lembaga lain yang peduli terhadap lingkungan dan masyarakat.

Di bawah ini merupakan gambaran wilayah studi yang akan dijadikan lokasi penelitian. Kelurahan Podosugih berada di Kecamatan Pekalongan Barat. Pengambilan wilayah studi ini didasarkan pada bahwa BKM Podosugih merupakan BKM percontohan di Kota Pekalongan dan sudah banyak mendapatkan pujian serta penghargaan dari

tingkat nasional dan internasional. Selain itu juga sudah banyak menjadi bahan kunjungan dari berbagai instansi baik pendidikan maupun instansi pemerintahan yang ingin belajar mengenai keberhasilan BKM Podosugih.



**Gambar a**  
**Peta Lokasi Kumuh Kelurahan Podosugih**

### Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengkaji peran kelompok Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam kaitannya penanganan masalah permukiman kumuh di Kelurahan Podosugih Kota Pekalongan. Untuk mencapai tujuan penelitian di atas, maka langkah-langkah yang harus dilakukan antara lain:

1. Mengetahui permasalahan permukiman yang pernah ada di wilayah studi.
2. Mengidentifikasi program-program pemerintah Kota Pekalongan dalam mengatasi permukiman kumuh.
3. Mengidentifikasi program kerja BKM di wilayah studi.
4. Mengidentifikasi fungsi dan peran kelompok BKM dalam penanganan permukiman kumuh.
5. Mengkaji dampak peran BKM terhadap kondisi masyarakat

### KAJIAN LITERATUR

Kajian literatur ini bertujuan untuk mengetahui pengertian permukiman kumuh, penyebab munculnya permukiman kumuh, cara mengatasi permukiman kumuh,

pengertian kelompok masyarakat serta proposisi penelitian

- **Pengertian Permukiman Kumuh**

Kawasan kumuh umumnya dikaitkan dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran tinggi. Kawasan kumuh dapat pula menjadi sumber masalah sosial seperti kejahatan, obat-obat terlarang dan minuman keras. Di berbagai wilayah, kawasan kumuh juga menjadi pusat masalah kesehatan karena kondisinya yang tidak higienis.

Ciri lain permukiman kumuh adalah tingkat kepadatan yang tinggi dan kurangnya akses ke fasilitas umum dan sosial. Status permukiman kumuh seringkali tidak jelas baik dari status administrasi dan hukum tanah, maupun kesesuaian dengan rencana tata ruang kota. Terkait status hukum atas tanah, biasanya hal ini yang membedakan permukiman kumuh (slum) dengan pemukiman liar (squatter).

- **Penyebab Munculnya Permukiman Kumuh**

Munculnya kawasan permukiman kumuh merupakan satu indikasi kegagalan program perumahan yang terlalu berpihak pada produksi rumah langsung terutama bagi masyarakat golongan ekonomi menengah ke atas, dan prioritas program perumahan pada rumah milik dan mengabaikan mengabaikan potensi rumah sewa (Sueca, 2004:56-107). Secara umum, penyebab munculnya kumuh dapat berasal dari kondisi fisik dan non fisik penduduk bersangkutan. Kondisi fisik secara jelas dapat dilihat dari kondisi lingkungan penduduk yang rendah serta status kepemilikan lahan yang ilegal, sedangkan non fisik yaitu berkaitan dengan kemampuan ekonomi dan budaya penduduk tersebut. Namun, dalam penelitian ini tidak akan dibahas mengenai status legal tanah karena lebih pada peran masyarakat dalam mengatasi kumuh. Untuk menyelesaikan masalah kumuh yang demikian, tidak hanya dengan perbaikan fisik tetapi juga dengan mengubah pola pikir masyarakatnya dengan pemberdayaan masyarakat.

- **Cara Mengatasi Permukiman Kumuh**

Mengatasi masalah permukiman tidak terbatas pada perbaikan lingkungan fisik namun juga perlu penanaman kesadaran akan pentingnya lingkungan sehat dan tertata. Salah satu model penanganan kawasan permukiman kumuh adalah dengan konsep peremajaan dan pembangunan bertumpu pada masyarakat yang terbagi dalam:

1. Konsep Peremajaan

Peremajaan permukiman kota adalah segala upaya dan kegiatan pembangunan yang terencana untuk mengubah/memperbaharui suatu kawasan terbangun di kota yang fungsinya sudah merosot atau tidak sesuai dengan perkembangan kota. Sehingga kawasan tersebut dapat meningkat kembali fungsinya dan menjadi sesuai dengan pengembangan kota. Peningkatan fungsi dalam peremajaan kota dimaksudkan untuk memperbaiki tatanan sosial ekonomi di kawasan bersangkutan agar lebih mampu menunjang kehidupan kota secara lebih luas.

Peremajaan harus dapat memecahkan kekumuhan secara mendasar, karenanya tidak hanya memberi alternatif pengganti lain yang pada kenyataannya dapat menimbulkan kekumuhan di tempat lain dan menjadikan beban baru bagi masyarakat, tetapi peremajaan harus tanpa menggusur dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat secara umum. Sehingga peremajaan yang antara lain dengan perbaikan fisik dipakai sebagai suatu alat untuk peningkatan taraf hidup, yang sekaligus memperbaiki pula kondisi fisik kota sejalan dengan program nasional penanggulangan kemiskinan.

2. Pembangunan Bertumpu Pada Masyarakat.

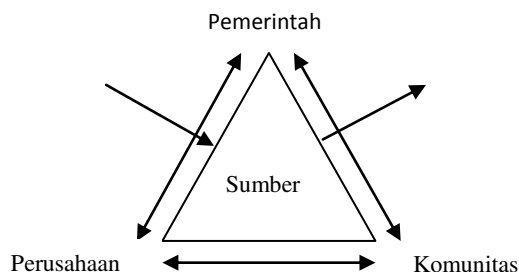
Pembangunan yang bertumpu pada kelompok masyarakat secara umum dapat dikatakan sebagai metode, proses, pendekatan dan bahkan pranata pembangunan yang meletakkan keputusan-keputusannya berdasarkan keputusan masyarakat. Tujuan dari pendekatan ini yaitu agar hasil pembangunan dapat diterima oleh masyarakat penghuni kawasan tersebut sesuai dengan kegiatan yang telah mereka laksanakan. Dalam

pendekatan ini, partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam proses perencanaan dan perancangan program pembangunan. Dua hal dapat ditarik dari pendekatan untuk permukiman. Pertama, metode partisipasi merupakan metode penting karena dengan metode inilah keputusan-keputusan pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dapat diambil. Kedua, karena pendekatan partisipatif dalam konteks ini adalah bersifat langsung, pengertian masyarakat selalu diartikan kelompok yang langsung memiliki kepentingan dengan proses pembangunan permukiman yang terkait. Karena itu, seringkali pendekatan Pembangunan Bertumpu Pada Masyarakat dilakukan untuk pembangunan yang bersifat lokal dan berorientasi pada kepentingan-kepentingan lokal.

Keberhasilan suatu pembangunan yang melibatkan swadaya masyarakat yaitu adanya keberlanjutan finansial untuk pembangunan. Setelah tidak ada bantuan pemerintah masyarakat mampu memelihara hasil pembangunan untuk generasi yang akan datang. Namun, dalam penelitian ini tidak membahas lebih lanjut mengenai keberlanjutan finansial karena lingkup penelitian yaitu terbatas pada peran masyarakat dalam perbaikan secara fisik dan peningkatan partisipasi masyarakat.

#### • Komunitas yang Berkelanjutan

Menurut Marsden (2008:32) dalam Arimurti (2012:27) ada tiga bentuk permodelan komunitas berkelanjutan. Namun, dalam penelitian ini menggunakan model interpretasi kedua melihat konteks yang lebih luas yakni merepresentasikan kelompok atau pemangku kepentingan yang meliputi pemerintah, perusahaan, dan komunitas.



Sumber: Marsden, 2008:31

**Gambar b**  
**Interpretasi Model Kedua**

Triangulasi antara pemangku kepentingan, yakni pemerintah, perusahaan, dan komunitas digunakan untuk mengidentifikasi keberlanjutan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Interaksi antara pemangku kepentingan juga mempengaruhi permintaan dan penawaran sumber daya yang berkontribusi terhadap keseluruhan aktivitas.

#### • Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)

Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) merupakan salah satu institusi/lembaga masyarakat yang berbentuk paguyuban, dengan kedudukan sebagai pimpinan kolektif di tingkat Desa/Kelurahan, yang bertanggung jawab menjamin keterlibatan semua lapisan masyarakat, dalam proses pengambilan keputusan secara partisipatif yang kondusif. BKM sebagai organisasi masyarakat di tingkat Desa/Kelurahan dengan berhimpun sesama warga setempat yang dipilih oleh masyarakat secara langsung melalui pemilihan umum dan bertumpu pada keputusan tertinggi ada ditangan anggota.

Tujuan BKM adalah membangun modal sosial (*capital social*) dengan menumbuhkan kembali nilai-nilai kemanusiaan, ikatan-ikatan sosial dan menggalang solidaritas bersama masyarakat untuk saling bekerjasama demi kebaikan, kepentingan dan kebutuhan bersama yang akan memperkuat keswadayaan masyarakat.

#### • Proposisi: Peran Kelompok Masyarakat dalam Penanganan Permukiman Kumuh

- a. Merancang dan melaksanakan program pembangunan.

Tujuan dari BKM itu sendiri yaitu memandirikan masyarakat, sehingga masyarakat diharapkan mampu merancang dan melaksanakan pembangunan yang telah disusun. Kegiatan ini disesuaikan dengan kebutuhan penduduk di wilayah studi, apa saja

yang perlu diperbaiki dan apa saja yang perlu dibangun guna memenuhi kebutuhan dasar bersama.

- b. Peningkatan keterampilan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.

Untuk meningkatkan kemampuan dasar kelompok masyarakat ini melakukan pelatihan, misal pelatihan penggunaan software komputer, dan pelatihan yang lainnya. Peningkatan keterampilan ini sesuai dengan peran kelompok masyarakat secara umum.

- c. Perbaikan lingkungan

Perbaikan lingkungan dalam BKM ini sesuai dengan peran kelompok masyarakat secara umum yaitu peran dalam meningkatkan kualitas lingkungan. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan menyusun action plan serta melaksanakan kerja bakti.

- c. Perbaikan lingkungan

Perbaikan lingkungan dalam BKM ini sesuai dengan peran kelompok masyarakat secara umum yaitu peran dalam meningkatkan kualitas lingkungan. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan menyusun action plan serta melaksanakan kerja bakti.

- d. Peningkatan partisipasi

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat perlu dilakukan diskusi.

### **METODOLOGI**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran kelompok BKM serta mengetahui dampak pelaksanaan program terhadap kondisi masyarakat. Penelitian ini difokuskan pada bagaimana pelaksanaan program dalam kelompok BKM sehingga berdampak baik bagi peningkatan partisipasi masyarakat dalam memelihara lingkungan.

Berdasarkan uraian diatas, maka metode yang sesuai dengan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, akan terjadi tiga kemungkinan terhadap masalah yang dibawa oleh peneliti dalam penelitiannya. Pertama, masalah yang dibawa oleh peneliti tetap, sehingga sejak awal sampai akhir penelitian sama. Kedua, masalah yang dibawa peneliti setelah memasuki lapangan akan berkembang yaitu memperluas

atau memperdalam masalah yang telah disiapkan. Ketiga, masalah yang dibawa peneliti setelah memasuki lapangan berubah total, sehingga harus ganti masalah. Untuk kebutuhan data dapat dilihat pada **Table a** di bawah ini.

### **TEMUAN HASIL PENELITIAN**

- o **Analisis Penyebab Permukiman Kumuh di Kelurahan Podosugih**

Kelurahan Podosugih merupakan salah satu kelurahan di Kota Pekalongan yang termasuk kawasan kumuh di Pekalongan Barat yang secara geografis berada di pusat pemerintahan. Kawasan kumuh tersebut berada di sepanjang Sungai Binatur. Kelurahan Podosugih terdiri dari 9 RW dengan 3 RW dalam kondisi kumuh. Ketiga RW tersebut berada di sepanjang Sungai Binatur yaitu RW 02, RW 03 dan RW 07.

Munculnya permukiman kumuh tersebut karena faktor rendahnya tingkat ekonomi masyarakat yang menyebabkan banyaknya keluarga miskin di ketiga RW tersebut.

Kemiskinan menyebabkan masyarakat tidak peduli terhadap kebersihan lingkungan sehingga lingkungan menjadi semakin kotor dan tidak terawat. Kondisi tersebut terlihat jelas disepanjang Sungai Binatur.

*"Penduduk Kelurahan Podosugih terutama RW 02,03 dan 07 banyak warga miskin sehingga mereka kurang peduli dengan lingkungannya, misalnya kalau sarana umum rusak mereka tidak bisa memperbaiki karena tidak mempunyai dana, apalagi untuk memperbaiki rumahnya. Kesimpulannya, kumuhnya itu berasal dari kondisi fisik yang tidak tertat dan fasilitas umum yang tidak terawat jadi terkesan kumuh"(BKM/03/PK\_01).*

- o **Analisis Peran BKM Kelurahan Podosugih dalam Mengatasi Permukiman Kumuh**

- **Peran BKM dalam Merencanakan dan Melaksanakan Pembangunan**

Rencana tersebut dapat terangkum dalam PJM Kelurahan Podosugih. Sebelum melaksanakan kegiatan

pembangunan/perbaikan, perlu dilakukan penyusunan beberapa rencana yang akan dikembangkan.

**Tabel a**  
**Kebutuhan data**

No.	Proposisi	Detail	Kebutuhan Data	Sumber	Teknik Pengumpulan
1.	Merancang dan melaksanakan program pembangunan	• Menyusun RTBL	• Dokumen perencanaan	• Anggota BKM	• Telaah Dokumen
		• Menyusun PJM	• Dokumen PJM	• Anggota BKM	• Telaah Dokumen, wawancara
2.	Peningkatan kemampuan dasar dalam pengelolaan lingkungan	• Peningkatan ekonomi	• Laporan pelatihan/dokumen tasi	• Anggota BKM • Masyarakat	• wawancara
		• peningkatan sosial	• dokumentasi	• Anggota BKM • Masyarakat	• wawancara
3.	Perbaikan kondisi lingkungan	• Perbaikan hunian	• Dokumentasi	• Anggota BKM	• Observasi, wawancara
		• Perbaikan jalan/utilitas/pe destrian	• Dokumentasi	• Anggota BKM	• Observasi, wawancara
		• Perbaikan persampahan	• Dokumentasi	• Anggota BKM	• Observasi, wawancara
		• Taman/RTH	• Dokumentasi	• Anggota BKM	• Observasi, Wawancara
4.	Peningkatan partisipasi	• Diskusi	• Deskriptif, dokumentasi	• Anggota BKM • Masyarakat	• Wawancara

Sumber: Penyusun, 2012

a. Menyusun PJM Pronangkis Kelurahan (Pembangunan Jangka Menengah)

Sebelum melaksanakan program, masyarakat diarahkan untuk menggali potensi dan permasalahan yang ada disekitar mereka kemudian pihak BKM merumuskan ke dalam PJM.

b. Menyusun Indikasi Program

Indikasi program berisi mengenai rencana detail pembangunan/perbaikan. Indikasi program berisi rencana kegiatan, tujuan dari kegiatan, jumlah unit/volume kegiatan, estimasi biaya serta lokasi dimana kegiatan tersebut

akan dilaksanakan. Adanya indikasi program ini akan mempermudah dalam pelaksanaan kegiatan serta pada saat penyusunan laporan pertanggungjawaban. Indikasi program ini tidak semua bisa dilaksanakan oleh masyarakat karena disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan.

- **Peran BKM dalam Peningkatan Keterampilan Masyarakat**

a. Peningkatan Ekonomi

Upaya peningkatan ekonomi yang dilakukan oleh kelompok BKM yaitu memberikan pinjaman dana bergulir. Tujuan

dari kegiatan ini yaitu menjadi masyarakat yang produktif sehingga mereka mampu dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi. Dengan asumsi, jika penduduk mampu secara ekonomi maka akan lebih peduli dengan lingkungan. Tidak semata-mata mencari nafkah dan melalaikan kewajibannya menjaga lingkungan. Dana bergulir ini digunakan untuk mendirikan usaha baru maupun mengembangkan usaha yang sudah ada.

b. Peningkatan sosial

Sedangkan peningkatan secara sosial yaitu dengan mengadakan pelatihan pengelasan, pelatihan komputer, peminjaman alat hajatan dengan harga yang lebih murah, serta mengadakan senam bersama serta pengobatan gratis. Selain itu juga dilakukan pelatihan pembukuan dan pembuatan laporan. Kegiatan tersebut bertujuan sebagai perekat sosial masyarakat Kelurahan Podosugih.



Sumber: BKM Podosugih, 2010

**Gambar c**  
**Pelatihan Pembukuan**

a.

Ada 2 macam bentuk bantuan yang diberikan dalam kegiatan pemugaran rumah yaitu pengecatan *fasade* bangunan dan perbaikan dan penataan rumah secara parsial atau total. Tujuan dari kedua kegiatan tersebut yaitu meningkatkan daya tarik visual kampung dan mewujudkan rumah/hunian warga yang sehat, indah, dan layak huni.

*“awal program pemugaran rumah dana yang diberikan berkisar antara Rp 1.000.000,- sampai Rp 2.500.000,-. Ada juga usulan dari Bapermas Kota Pekalongan sebesar Rp 5.000.000,-. Besarnya dana disesuaikan kebutuhan penduduk dalam pemugaran rumahnya. Pemugaran yang total atau cuma sebagian saja” (BKM/04/PL\_02).*



Sumber: BKM Podosugih, 2011

**Gambar d**  
**Observasi anggota BKM Sebelum Pemugaran Rumah**

b. Perbaikan Jalan/Utilitas/Pedestrian

Selain penataan dan pemugaran rumah, perbaikan fisik juga difokuskan pada perbaikan jalan lingkungan. Kegiatan tersebut yaitu pembangunan jalan inspeksi sepanjang Sungai Binatur (bahan paving lebar 3m) yang bertujuan meningkatkan kualitas lingkungan dan area ekonomi warga miskin dengan estimasi biaya pembangunan Rp 462.000.000,-.

Selain itu juga dilakukan kegiatan pengadaan penerangan di jalan inspeksi sepanjang Sungai Binatur yang bertujuan memberikan keamanan dan keindahan kawasan, penyediaan *street furniture*, penyediaan sarana air bersih.

c. Persampahan

Untuk pengelolaan sampah tiap RW, telah memiliki tempat sampah individu yang akan dikoordinir petugas untuk mengumpulkan di truk sampah Pemerintah Kota yang rutin mengangkut sampah. Petugas tersebut dipilih berdasarkan rebug warga. Setelah dikumpulkan maka akan diangkut menuju tempat pengolahan sampah menjadi kompos di Kelurahan Bendan. Selain itu, sudah ada KSM yang mengembangkan pembuatan keranjang takakura untuk pengolahan sampah secara individu.

*“penyediaan tong sampah berdasarkan jenisnya kebanyakan di RW 01 sampai RW 07 sedangkan RW 08 dan RW 09 itu kawasan perumahan elit yang sudah layak huni jadi sudah ada tong sampah sendiri” (BKM/01/PL\_11).*





Sumber: Penyusun, 2012

**Gambar e**  
**Penyediaan Tong Sampah**

#### d. Taman/RTH

Perbaikan yang dilakukan berkaitan dengan taman/RTH yaitu membangun taman lingkungan dalam lingkup RW. Tujuan dari pembangunan taman ini yaitu untuk meningkatkan fungsi ruang terbuka dan menambah aspek ekonomi dan estetika. Pembangunan taman ini akan dilakukan di RW 02, RW 03, dan RW 07.

- **Peran BKM dalam Peningkatan Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi masyarakat merupakan faktor utama dalam keberhasilan pembangunan baik sosial, ekonomi dan lingkungan. Makna partisipasi tidak hanya berarti sekedar ikut serta tetapi lebih kepada ikut melaksanakan setiap tahap pembangunan. Tingginya tingkat partisipasi juga tergantung kepada pekerja sosial yang mendampingi keterlibatan masyarakat. Seorang stakeholder harus memiliki strategi untuk membawa masyarakat menjadi aktif dalam kegiatan.

Bedasarkan definisi partisipasi tersebut, jenis partisipasi masyarakat di Kelurahan Podosugih yaitu partisipasi terinduksi. Munculnya rasa partisipatif masyarakat karena adanya pengaruh atau ajakan dari kelompok BKM Podosugih. BKM Podosugih mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam program perbaikan lingkungan, ekonomi dan sosial. Adanya BKM kenyataannya mampu mengkoordinir masyarakat dalam kegiatan

pembangunan. Setiap masyarakat wajib terlibat dalam pelaksanaan program.

*"bukan hal yang mudah ya untuk membawa masyarakat ke dalam konsep pemberdayaan, apalagi harus mengorbankan waktu dan tenaga. Hal pertama yang kami (BKM) lakukan yaitu sosialisasi/memperkenalkan diri, kemudian melakukan diskusi dan merancang programnya setelah itu mengikutsertakan masyarakat dalam pembangunan. Dengan demikian masyarakat mampu menikmati hasil yang telah mereka kerjakan. Namun untuk evaluasi, masyarakat belum bisa melakukannya sendiri. Pihak BKM yang melakukan evaluasi bersama dengan tim faskel Podosugih"(BKM/01/PP\_14).*

- **Dampak Peran BKM yang Dirasakan Oleh Masyarakat**

- a. **Dampak Terhadap Kondisi Lingkungan Masyarakat**

Adanya peran BKM dalam perbaikan lingkungan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Program awal BKM yaitu membangun jamban keluarga bagi masyarakat yang belum memiliki MCK sendiri serta penyediaan sumur gali bagi masyarakat. Sebelumnya warga Kelurahan Podosugih masih sedikit yang memiliki jamban pribadi, sehingga kebanyakan warganya menggunakan sungai untuk MCK.

- b. **Dampak Terhadap Kondisi Ekonomi Masyarakat**

Peningkatan ekonomi yang dilakukan kelompok BKM yaitu dengan pinjaman dana bergulir. Penggunaan dana bergulir tersebut untuk peningkatan usaha produktif. Adanya bantuan dalam bentuk pinjaman dana bergulir ini juga mampu meningkatkan usaha yang kurang berkembang. Saat ini telah banyak tumbuh unit usaha rumah tangga di Kelurahan Podosugih.

- c. **Dampak Terhadap Kondisi Sosial Masyarakat**

Adanya peran BKM dalam peningkatan sosial memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dampak paling terasa yaitu dalam perubahan perilaku masyarakat di Kelurahan Podosugih. Penyebab lingkungan kumuh di Kelurahan Podosugih karena perilaku

masyarakat yang tidak peduli dengan kebersihan lingkungan sehingga lingkungan terkesan kumuh. Sedangkan dari segi partisipasi masyarakat, sudah cukup baik. Pelibatan masyarakat dalam kegiatan perbaikan yaitu dengan membentuk KSM. Jumlah KSM ini sesuai dengan jumlah program yang akan dijalankan.

#### **d. Keberlanjutan Finansial dalam Pembangunan**

Adanya keterlibatan masyarakat dalam penyediaan dana secara swadaya menunjukkan adanya peran aktif dari masyarakat dalam kegiatan. Pembangunan yang dilakukan BKM saat ini menggunakan dana PNPM dalam bentuk hibah sehingga tidak ada kewajiban untuk mengembalikan.

*“dana pembangunannya dari PNPM bersifat hibah jadi tidak dikembalikan. Selama beberapa tahun ini bantuan masih saja ada dari PNMP, kalau bantuan sudah dihentikan ya bantuan dananya dari APBD Kota Pekalongan” (BKM/01/DP\_14).*

Secara umum sumber dana proyek BKM berasal dari APBN, APBD Propinsi dan APBD Kota dimana dana tersebut berasal dari pinjaman Bank Dunia. Sedangkan swadaya dari masyarakat tidak cukup untuk membiayai keseluruhan pembangunan. Dana swadaya dari masyarakat sekitar 10% dari total biaya. Dengan demikian, dapat dikatakan jika pembangunan atau peran BKM belum mampu membentuk keberlanjutan finansial dalam pembangunan. Namun dalam penelitian ini tidak membahas secara mendalam mengenai keberlanjutan finansial karena ruang lingkup bahasan hanya pada peran BKM dalam penanganan kumuh.

## **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis pada penelitian ini telah menjawab pertanyaan penelitian serta sesuai dengan proposisi yang telah disusun sebelumnya. Tetapi ada satu proposisi yang tidak sesuai setelah dikonfirmasi ke lapangan yaitu peran kelompok BKM dalam peningkatan keterampilan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Informasi di lapangan menyebutkan

bahwa peningkatan keterampilan yaitu peningkatan ekonomi dan peningkatan sosial masyarakat. Jadi, yang menjadi fokus BKM Podosugih yaitu meningkatkan kemampuan sosial ekonomi masyarakat bukan keterampilan masyarakat dalam mengelola lingkungan.

Dalam mengatasi permasalahan yang ada, BKM menggunakan konsep pemberdayaan masyarakat. Adanya konsep ini pada kenyataannya mampu mendorong masyarakat menjadi lebih peduli terhadap lingkungan serta berperan aktif dalam kegiatan. Kepedulian ini dapat dilihat dari kebiasaan masyarakat membuang sampah di sungai menjadi lebih peduli dengan membuang sampah ditempatnya. Keberhasilan BKM ini menjadikan masyarakat Podosugih sebagai masyarakat yang madani.

### **Rekomendasi**

1. BKM Kelurahan Podosugih  
Meningkatkan keaktifan anggota BKM yang kurang aktif agar pembangunan semakin baik lagi.
2. Pemerintah Kota Pekalongan  
dengan keberhasilan BKM Podosugih ini diharapkan menjadi inspirasi pemerintah untuk mengembangkan BKM lain yang sudah ada di Kota Pekalongan.
3. Masyarakat  
Untuk tetap menjaga kepedulian terhadap lingkungan yang selama ini sudah baik agar tercipta lingkungan yang sehat dan berkelanjutan.
4. Studi terkait  
Penanganan permukiman/lingkungan kumuh tidak hanya dilihat dari peran pemerintah, namun lebih riil jika dilihat dari peran masyarakatnya. Penelitian ini tidak membahas keberlanjutan finansial dalam pendanaan pembangunan proyek sehingga dapat dijadikan rekomendasi penelitian lebih lanjut bagi peneliti lain.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Jurnal dan Buku**

Abegunde, A.A. The Role Of Community Based Organisations In Economic Development In

- Nigeria: The case of Oshogbo, Osun state, Nigeria. *International NGO Journal* Vol. 4, Th 2009:236-253.
- Ala, A.B. 1996. *Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Arimurti, A. 2012. "Aspek Keberlanjutan Kelembagaan dalam Pelaksanaan PLP-BK (Studi Kasus: Desa Kutoharjo Kabupaten Kendal)." Tugas Akhir tidak diterbitkan. Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik. Universitas Diponegoro: Semarang.
- Bungin, B. 2006. *Metodologi Penelitian Kuantitatif. Edisi pertama*. Jakarta:Kencana.
- Chechetto-Salles, M and Geyer, Y. 2006. *Community-Based Organisation Management, Handbook series for community-based organizations*. Institute for Democracy in South Africa (IDASA): South Africa.
- Hutapea, J. 2005. Analisis Faktor Penyebab Kumuh di Kota Medan, dalam *Jurnal Wawasan*. Vol.9, No.3
- Komarudin. 1997. *Menelusuri Pembangunan Perumahan Permukiman*. Jakarta: Yayasan Realstate Indonesia.
- Malau, Y.N. 2006. "Analisis Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Kawasan Kumuh di Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai." *WAHANA HIJAU: Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Vol.2, No.1, Agustus, hal.
- Marzuqi, A. 2006. "Refleksi Pembangunan Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Layanan Publik Pada Khususnya Serta Pembangunan Pada Umumnya." *Seminar The Asia Foundation, Department For International Development (DFID)*. Pekalongan, Senin 14 Agustus 2006
- Menteri Pekerjaan Umum RI. 2008. "Menuju Pembangunan Perkotaan Bebas Kumuh 2025." Makalah Seminar Peringatan Hari
- Panudju, B. 1999. "Pengadaan Perumahan Kota dengan Peran Serta Masyarakat Berpenghasilan Rendah". Bandung: Alumni.
- Prijono, O.S. & A.M.W. Pranarka, 1996. *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: *Center For Strategic and International Studies*(CSIS).
- Sadyohutomo, M. 2008. "Manajemen Kota dan Wilayah". Bandung: Bumi Aksara.
- Soedjatmoko. 1980. *Dimensi-dimensi kemiskinan: suatu bunga rampai*. Jakarta: YIIS dan HIPIS
- Srinivas, H. 2003. *Slum, Squatter Areas and Informal Settlement*. 9th International Conference On Sri Lanka Studies, Matara, Sri Lanka, Arawinda Nawagamuwa and Nils Viking.
- Sueca, N.P. 2004. "Permukiman Kumuh, Masalah Atau Solusi?." *Jurnal Permukiman NATAH*. Vol.2, No.2.hal:56-107
- Sugiono. 2010. "Metodologi Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D." Bandung: Alfabeta.
- Sugiri, Agung. 2009. "Financing Slum Upgrading in Indonesia: Can Sustainability Reinvestment Help?." Dalam Santosa, H. W. Astuti, D.W Astuti (Ed). *Sustainable Slum Upgrading in Urban Area*. CIB Report Publication. Surakarta: PIPW LPPM UNS.
- Sukmaniar. 2007. "Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Pasca Tsunami Di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar." Tesis tidak diterbitkan. Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota. Universitas Diponegoro: Semarang.
- Sulistiyani, A.T. 2004. "Kemitraandan model-model Pemberdayaan." Yogyakarta. Gava Media.
- Sumodiningrat, G. 1997. "Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat," Jakarta: PT. Bina Rena Pariwar.,
- Suparlan, P.1995. "Kebudayaan Kemiskinan dalam Kemiskinan di Perkotaan: Bacaan Untuk Antropologi Perkotaan." Jakarta: YOI.
- Susanto, J. 2006. "Kepapaan dan Perekat Sosial." *Jurnal Penyuluhan*. Vol.2, No.1.hal: 60-62
- Todaro, M. P. (1976): "Internal Migration in Developing Countries : A Review of Theory, Evidence, Methodology and Research Priorities," International Labour Office, Geneva
- Tohjiwa, A.D. 2008. "Peremajaan Permukiman Kumuh di DKI Jakarta." *Jurnal Ilmiah Desain dan Konstruksi*. Vol 7, No 1.Hal.23-25.

#### **Data/Laporan Pemerintah**

- BPS. 2010. *Kota Pekalongan Dalam Angka, Tahun 2010*. BPS Kota Pekalongan
- Direktorat Penyuluhan dan Bimbingan Sosial. 1980. "Pembinaan Partisipasi Sosial". Departemen Sosial. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Perumahan dan Permukiman. 2001. "Petunjuk Umum Pelaksanaan Peremajaan Lingkungan Permukiman Kumuh

di Perkotaan dan Perdesaan". Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah.

Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 06/KPTS/1994 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Perumahan Bertumpu Pada Kelompok.

Pembangunan Jangka Menengah (PJM) Pronangkis Kelurahan Podosugih Tahun 200-2009.

Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 22 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2005-2010.

#### **Artikel Online**

Benu, N.J. 2012. *Permukiman kumuh di Indonesia Kian Meluas*. [home page of Okezone.com] [online].

Pada: <http://property.okezone.com/read/201>

[2/02/23/471/580995/permukiman-kumuh-di-indonesia-kian-meluas](http://2/02/23/471/580995/permukiman-kumuh-di-indonesia-kian-meluas), Kamis, 23 Februari 2012. Diakses pada 2 Mei 2012.

Fatah, I.R. 2012. *keberhasilan PLPBK ada pada inisiatif Pemda*. [home page of warta] [online].

Pada: <http://www.p2kp.org/wartadetil.asp?mid=4886&catid=1&12>, 12 Juli 2012. Diakses pada: 14 Agustus 2012.

Masudah, S. 2011. *Pemkot Pekalongan Renovasi Ribuan Rumah Tak Layak Huni*. [home page of disnakertrans] [online].

Pada: <http://disnakertrans.pekalongankota.go.id/>. Minggu, 20 November 2011. Diakses pada 15 Mei 2012.

Nana. 2011. "BKR KUNCUP MEKAR, BENDAN PEKALONGAN", dalam Buletin Swara "Kuncup Mekar". Edisi 1/Januari/2011. [4 Januari 2012]